



# PEDOMAN KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ACEH



# PEDOMAN KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ACEH

*Penulis:*

Drs. Lukman Ibrahim, M.Pd  
Irun Sani, SE., MM  
Marwan Idris, SE., M.I.K

*Pengarah:*

Prof. Eka Srimulyani, Ph.D  
Dr. Hasrati Ali, MM  
Dr. Iskandar Syah Madjid  
Dr. Sofyan Syahnur

*Didukung Oleh:*



**Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) ACEH**

Gedung Bappeda Aceh

Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No.26 Banda Aceh Kode Pos 23121

Telpon 0651 2682252

<https://tkp2k.acehprov.go.id>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Puji beserta syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, hingga kita semua masih diberikan kemampuan menjalankan segala kewajiban sesuai dengan yang diamanahkan. Shalawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang penuh dengan rahmat Allah SWT karena hanya berkat rahmat dan karunia serta iradah-Nyalah penyusunan Pedoman Konsorsium Perguruan Tinggi Aceh dalam Penanggulangan Kemiskinan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk mempersiapkan panduan tentang pelaksanaan peran Perguruan Tinggi (PT) di seluruh Aceh baik dalam tataran makro maupun mikro yang terkoordinasi dengan baik untuk diarahkan kepada program penanggulangan kemiskinan. Koordinasi yang dilaksanakan menjangkau tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan pembagian wilayah kerja menyesuaikan dengan letak masing-masing perguruan tinggi berdasarkan zona wilayah Aceh. Kumpulan perguruan tinggi di zona pusat dengan dua perguruan tinggi induk, Unsyiah dan UIN Ar-Raniry, yang juga telah “membedani” lahirnya beberapa perguruan tinggi di berbagai zona wilayah Aceh akan mengkoordinasikan pelaksanaan peran di level provinsi juga membantu koordinasi pelaksanaan kumpulan perguruan tinggi dalam pelaksanaan peran di level kabupaten/kota di semua zona wilayah Aceh.

Koordinasi yang dilakukan termasuk sharing keahlian dan pengalaman untuk setiap bidang yang dibutuhkan di level Provinsi maupun kabupaten/kota untuk memaksimalkan peran sehingga bisa saling membantu sampai dengan kebutuhan detil-detil keahlian “sekecil dan sedalam” apapun. Sesuai dengan statusnya sebagai perguruan tinggi “induk” dan keragaman keahlian yang dimiliki, Unsyiah dan UIN Ar-Raniry tentu harus berada di posisi terdepan dalam berkoordinasi di kedua level pemerintahan tersebut. Beberapa bidang keahlian dan pengalaman yang dimiliki Unsyiah sangat mungkin harus ikut dikerahkan untuk melengkapi keahhlian yang dibutuhkan oleh zona-zona wilayah lain yang dipimpin oleh perguruan tinggi di zona tersebut. Sebaliknya, beberapa keahlian yang dimiliki oleh perguruan tinggi di luar zona pusat juga ada yang dibutuhkan untuk memperkuat keahlian perguruan tinggi di zona pusat di samping juga ada yang diajak untuk “magang” sebagai wadah untuk sharing keahlian, ketrampilan dan pengalaman.

Pedoman ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi dan panduan kerja Konsorsium Perguruan Tinggi dalam mendukung usaha Pemerintah Aceh mempercepat penanggulangan kemiskinan. Di samping itu juga bermanfaat sebagai referensi bagi para peneliti bidang “kemiskinan” dan sinkronisasi pengabdian dosen dan mahasiswa pada setiap perguruan tinggi di Aceh. Walaupun Pedoman Konsorsium ini sudah melalui berbagai tahapan sebagai bagian dari prosedur penyusunannya baik berupa curah pendapat dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh, kegiatan diskusi kelompok fokus (FGD) dan *workshop* sebanyak empat kali yang disponsor oleh Program KOMPAK Aceh, disadari bahwa Pedoman ini masih banyak kekurangannya dan diperlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu, guna memenuhi berbagai harapan dari pedoman ini, maka berbagai kritik serta saran atau masukan yang konstruktif, sangat diharapkan dari semua pihak untuk membantu penyempurnaannya.

**Banda Aceh, 18 Desember 2019**

Program KOMPAK Aceh,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah sebagai Sekretaris TKP2K Aceh,

**Dicky Ariesandi**  
Provincial Manager

**Ir. Helvizar, M. Si.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620611 199203 1 004

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional dan paling persisten yang dihadapi oleh seluruh dunia hingga saat ini, bahkan setelah berakhirnya era *Millenium Development Goals* yang salah satu tujuannya adalah memberantas kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan baik secara lokal maupun global namun nampaknya belum menunjukkan hasil yang signifikan. Jumlah yang masih tinggi dan ketimpangan yang semakin melebar adalah gambaran kemiskinan saat ini yang memerlukan upaya penanganan lebih serius lagi. Sebagai negara dengan kemiskinan yang cukup tinggi salah satu tantangan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah banyaknya pihak yang terlibat (pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat) namun masing-masing berjalan sendiri-sendiri dengan koordinasi yang sangat terbatas. Kondisi tersebut telah mengakibatkan program-program pengentasan kemiskinan yang dikembangkan saling tumpang tindih dan berjangka pendek, dalam hal distribusi terjadi bias sasaran dan tidak merata, serta dalam penggunaan sumber daya tidak efisien.

Dampak dari semua permasalahan itu adalah upaya penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan kurang efektif dan berkelanjutan. Menghadapi persoalan tersebut, perguruan tinggi ikut mengambil bagian dalam meninisiasi terbentuknya konsorsium untuk penanggulangan kemiskinan. Aspek Pendidikan memainkan peran penting dalam salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dalam konfigurasi keterlibatan pihak-pihak yang beragam dan akan menghasilkan alternatif kebijakan penanggulangan kemiskinan yang efektif. Inisiasi Konsorsium tercetus pada persiapan dan pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Rapat Kerja (Raker) Litbang dan TKP2K pada bulan Oktober dan November 2018. Inisiasi ini diharapkan dapat menggema ke seluruh wilayah Aceh melalui perguruan-perguruan tinggi yang ada di semua zona-zona wilayah Aceh

Tim penulis.

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	0
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>2</b>
AKRONIM .....	4
BAGIAN I .....	5
PELIBATAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH .....	5
<b>A. Gambaran Umum Pelibatan Perguruan Tinggi .....</b>	<b>5</b>
<b>B. Sasaran Pelibatan Perguruan Tinggi .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Strategi Pelibatan Perguruan Tinggi .....</b>	<b>7</b>
BAGIAN II .....	9
MEKANISME PELIBATAN KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI .....	9
<b>D. Menyusun Agenda Kolaborasi Perguruan Tinggi Dengan Pemerintah Daerah .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Bentuk Kegiatan dan Pembiayaan .....</b>	<b>11</b>
BAGIAN III .....	13
PERAN KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI .....	13
<b>F. Kolaborasi untuk Pemecahan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>G. Peran Makro dan Mikro Penyusunan Program .....</b>	<b>14</b>
BAGIAN IV .....	26
INSTRUMEN DALAM PELAKSANAAN PELIBATAN KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN .....	26
<b>I. Analisis Kondisi Kemiskinan Daerah melalui Aplikasi Sistem Perencanaan dan     Penganggaran, Analisis &amp; Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT). .....</b>	<b>26</b>
<b>I. Aplikasi E-Sedekah .....</b>	<b>30</b>
<b>J. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik .....</b>	<b>31</b>
<b>J. Analisis Anggaran Belanja Untuk Penanggulangan Kemiskinan .....</b>	<b>32</b>
BAGIAN V .....	34
PENUTUP .....	34
Referensi .....	36

## AKRONIM

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBA	: Anggaran Pendapatan Belanja Aceh
APBD/K	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Kabupaten
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
PT	: Perguruan Tinggi
TKP2K	: Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
KOMPAK	: Kolaborasi Masyarakat Dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan
KKN	: Kuliah Kerja Nyata (KKN)
KPM	: Kuliah Pengabdian pada Masyarakat (KPM)
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
SEPAKAT	: Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu
SKPA/D	: Satuan Kerja Pemerintah Aceh/Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Pemerintah Daerah

# BAGIAN I

## PELIBATAN PERGURUAN TINGGI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI ACEH

### A. Gambaran Umum Pelibatan Perguruan Tinggi

Program penanggulangan kemiskinan terus dilakukan, namun jumlah masyarakat miskin dan kesenjangan masih tinggi adalah gambaran kemiskinan saat ini yang memerlukan upaya penanganan lebih serius lagi. Pencapaian target penurunan angka kemiskinan perlu bersinergi dengan banyak pihak, salah satu pihak yang sangat potensial dan didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) mumpuni untuk terlibat dan sekaligus mengimplementasikan upaya penanggulangan kemiskinan adalah Perguruan Tinggi (PT) yang tersebar di berbagai wilayah di kabupaten/kota di Aceh. Agar pelibatan lembaga yang memiliki *tri dharma* ini terkoordinasi dengan baik, maka harus dibentuk satu wadah yang biasanya disebut *konsorsium* atau gabungan beberapa perguruan tinggi. Pembentukan konsorsium untuk tujuan ini dapat dilakukan di level nasional, provinsi dan kabupaten/kota atau gabungan level provinsi bersama beberapa atau semua kabupaten/kota. Khusus di Aceh, mengingat konsorsium perguruan tinggi pertama sekali diwacanakan untuk dibentuk, maka inisiasi pembentukan konsorsium merupakan gabungan level Provinsi dan kabupaten/kota.

Pengembangan peran konsorsium di kedua level daerah ini bisa dilakukan secara terpisah di level kabupaten/kota atau melalui penggabungan kabupaten/kota menurut zona wilayah Aceh dengan dikoordinasikan oleh konsorsium di level Provinsi. Penggabungan demikian juga memudahkan koordinasi untuk saling mengisi atau menutupi kebutuhan keahlian yang dibutuhkan dalam implementasi peran oleh konsorsium kabupaten/kota tertentu untuk membantu mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Untuk mewujudkan wacana tersebut dapat terwujud sebagai salah satu upaya dalam pemanfaatan sumber daya manusia dari perguruan tinggi untuk merumuskan konsep-konsep teoretis dan implementatif dalam upaya membantu Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mempercepat penanggulangan kemiskinan. Beberapa pokok pikiran yang melatarbelakangi pelibatan perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mengerahkan semua keahlian melalui SDM yang dimiliki dan dibutuhkan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.



2. Tersebar nya perguruan tinggi di berbagai zona wilayah Aceh mendekatkan layanan keahlian pada berbagai level pemerintahan di setiap kabupaten/kota. Dalam memberikan layanan keahlian, PT di berbagai zona bisa saling melengkapi dan menguatkan.
3. Melalui kegiatan *tri dharma*, SDM perguruan tinggi siap dikerahkan untuk meneliti/mengkaji berbagai persoalan atau isu tentang kemiskinan di Aceh dan untuk melaksanakan pengabdian yang terintegrasi dengan program-program percepatan pengentasan kemiskinan di berbagai zona wilayah baik.
4. Perguruan tinggi melalui jejaring nasional dan internasional dapat memaksimalkan perannya sebagai mediator dalam program pengentasan kemiskinan.
5. Perguruan tinggi memiliki wadah diseminasi ide yang sangat efektif, kondusif, dan progresif sehingga model-model pemberdayaan dapat tersebar dengan cepat dan menginspirasi banyak pihak.

Dari beberapa hal tersebut di atas, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dengan adanya konsorisi perguruan tinggi dapat terbantu kemitraan dengan perguruan tinggi dalam setiap rumusan kebijakan dan program untuk melibatkan perguruan tinggi di berbagai level lembaga atau organisasi. Khusus untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, pelibatan perguruan tinggi antara lain bertujuan membantu hal-hal berikut:

1. Mendorong lahirnya kebijakan dan alokasi anggaran pemerintah kabupaten/kota yang berpihak pada pengentasan kemiskinan.
2. Melahirkan rumusan landasan teoretis, pendekatan dan strategi untuk upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
3. Melahirkan rumusan rekomendasi yang didasarkan pada kajian-kajian yang komprehensif terhadap isu-isu kemiskinan dengan melibatkan semua *stakeholders* terkait dengan subjek kajian yang tepat untuk upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
4. Mendukung upaya Pemerintah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan program-program percepatan pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengabdian dosen dan Kuliah Kerja Nyata (KKN atau KPM) mahasiswa.

5. Mendukung upaya Pemerintah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota menginisiasi dan mendampingi tumbuhnya kegiatan ekonomi kreatif dengan pendekatan *participatory* di berbagai wilayah Aceh yang diawali dengan survei ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal masing-masing.

## **B. Sasaran Pelibatan Perguruan Tinggi**

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional paling aktual dari masa ke masa. Selain sulit ditanggulangi, ia juga telah menjadi masalah ekstrim yang sangat menyita perhatian seluruh dunia (Blanden dan Gibsson 2006). Sesuai dengan tujuan di atas, pelibatan perguruan tinggi diharapkan secara operasional dapat dirinci sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Membantu aspek-aspek rumusan konsep dan implementasi kebijakan dan program dan kegiatan dalam percepatan pengentasan kemiskinan.
2. Menjadikan perguruan tinggi sebagai bagian daripada sistem yang *koheren* dalam memberikan pelayanan publik untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
3. Membuka akses pendidikan dan layanan dasar lainnya yang seluas-luasnya kepada masyarakat miskin.
4. Menjadikan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang memfasilitasi kebutuhan lokal dan nasional dalam rangka pengentasan kemiskinan.
5. Perguruan tinggi bisa ikut serta dalam mengidentifikasi dan merekomendasikan lokasi program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis survei di desa-desa.
6. Perguruan Tinggi didorong menjadi pusat unggulan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan pusat inovasi terkait pengembangan potensi unggulan di wilayah masing-masing.

## **C. Strategi Pelibatan Perguruan Tinggi**

Berbagai strategi bisa dijalankan dalam pelibatan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 Tahun 2015 Tentang percepatan penanggulangan kemiskinan pasal 10 ayat 1 (satu) menjelaskan bahwa keanggotaan tim Nasional percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya

dalam penanggulangan kemiskinan, kosorisum perguruan tinggi akan mengambil bagian dari proses tersebut, setidaknya ada beberapa strategi yang akan dilakukan oleh konsorsium perguruan tinggi diantaranya:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam semua kegiatan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam menciptakan dan mengimplementasikan program-program ekonomi kreatif.
3. Meningkatkan kualitas masyarakat yang produktif dan berdaya saing.
4. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui beberapa pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi.
5. Mendorong sinergi kebijakan dan program secara bersama dengan semua unsur pemerintah yang berpihak pada pengentasan kemiskinan (*pro-poor*).
6. Menghasilkan penelitian dan kajian termutakhir terkait dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

## **BAGIAN II.**

### **MEKANISME PELIBATAN KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI**

#### **D. Menyusun Agenda Kolaborasi Perguruan Tinggi Dengan Pemerintah Daerah**

Pada bagian ini, diuraikan bagaimana konsorsium Perguruan Tinggi diharapkan dapat berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerahnya, berikut diantaranya :

- a. Konsorsium membantu pemerintah daerah dalam merumuskan “pendekatan substansi SPKD terhadap substansi RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja-SKPD terkait percepatan penanggulangan kemiskinan” (TNP2K, 2017). Selain itu, sesuai dengan MoU antara Konsorsium perguruan tinggi di Aceh dan Pemerintah Aceh Konsorsium perguruan tinggi menyampaikan hasil-hasil kajian terhadap berbagai komponen renstra untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari dasar perencanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- b. Terjadinya peningkatan wawasan dan pengetahuan terkait dengan kemiskinan pada masyarakat luas. Dalam hal ini konsorsium perguruan tinggi bisa berperan membantu Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota merumuskan konsep dan strategi penyampaian informasi (sosialisasi) kepada masyarakat di setiap wilayah dengan mempertimbangkan kearifan lokal masing-masing.
- c. Terlibat aktif dalam setiap kegiatan pemerintah, lembaga swadaya, dan swasta di tingkat lokal dan nasional dalam rangka pengentasan kemiskinan. Konsorsium perguruan tinggi selalu siap mengkoordinasikan pelibatan SDM setiap perguruan tinggi untuk setiap kebutuhan keahlian yang bisa saling melengkapi antara satu wilayah dengan wilayah-wilayah lainnya.
- d. Peningkatan bantuan pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya untuk keluarga miskin. Konsorsium perguruan tinggi terlibat aktif melalui diseminasi hasil kajian efektivitas dan efisiensi bantuan baik yang dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai instansi pemerintah melalui SKPA dan SKPK maupun yang dilakukan secara mandiri oleh pusat-pusat kajian strategis masing-masing perguruan tinggi.

**Tabel 1: Agenda Kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

No.	Agenda	Uraian	Batas Waktu
<b>Pra Terbentuk dan diresmikannya Konsorsium Perguruan Tinggi (Draf Pedoman)</b>			
1.	Koordinasi untuk perumusan <b>Struktur Organisasi</b> dan Pedoman Kerja Konsorsium PT	Koordinasi ini dijalankan melalui perwakilan masing-masing PT melalui komunikasi <i>email</i> atau <i>whatsapps</i> . Komunikasi ini juga meminta masing-masing PT menyampaikan nama-nama perwakilannya yang akan menempati posisi tertentu pada struktur organisasi dan terlibat dalam penyusunan Pedoman Kerja Konsorsium PT.	Terlaksana
2.	<b>Koordinasi Penyusunan draf MoU</b> antara Konsorsium PT Aceh dan Pemerintah Aceh	Koordinasi seperti di atas untuk menyusun draf MoU antara Konsorsium PT Aceh dan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.	Terlaksana
3.	<b>Melaporkan</b> pada Pimpinan PT masing-masing untuk meminta persetujuan terhadap Susunan Struktur Organisasi dan Draf MoU	Koordinasi seperti di atas sampai menghasilkan konsep final Susunan Struktur Organisasi dan MoU	Terlaksana
4.	<b>Peresmiaan</b> Konsorsium PT Aceh untuk Penanggulangan Kemiskinan	Koordinasi seperti di atas untuk memastikan kehadiran Rektor, Direktur atau Ketua PT masing-masing.	Terlaksana
<b>Pasca diresmikannya Konsorsium Perguruan Tinggi Aceh</b>			
No.	Agenda	Uraian	Batas Waktu
5.	Pelaksanaan peran makro di internal dan intra kampus dalam masing-masing zona, dan eksternal kampus	Setiap PT melaksakan peran mikro di internal kampus. Berkoordinasi dengan PT-PT dalam zona masing-masing untuk perumusan kebijakan yang pro-kemiskinan melalui kegiatan pengabdian dan penelitian dosen, bakti sosial dan pelaksanaan KKN/KPM. Juga, melaksanakan peran advokasi untuk pengurangan angka kemiskinan pada lembaga-lembaga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, mitra pemerintah dan swasta.	Periodik setiap penyusunan perencanaan program dan alokasi anggaran PT
6.	Pelaksanaan peran mikro di internal dan intra kampus dalam masing-masing zona, dan eksternal kampus	Berkoordinasi dalam pelaksanaan peran seperti pada peran makro.	Periodik setiap implementasi program dan kegiatan

No.	Agenda	Uraian	Batas Waktu
	a. Identifikasi potensi (survei lokasi)	Potensi-potensi program dan kegiatan pro-kemiskinan di internal masing-masing kampus, pada PT di lingkungan zonanya dan di seluruh Aceh.	Periodik setiap tahapan-1 implementasi program dan kegiatan
	b. Penyiapan <i>tool</i> dan pelaksanaan FGD	FGD dengan pendekatan partisipatif dilakukan untuk memutuskan satu, dua atau beberapa program dan kegiatan yang mungkin dilaksanakan bagi penerima manfaat di kampus masing, antar kampus di zona dan masyarakat.	Periodik setiap tahapan-2 implementasi program dan kegiatan
	c. Koordinasi internal dan intra-kampus di zona	Berkoordinasi dengan PT dalam zona untuk kolaborasi pelaksanaannya (saling “mengisi” keahlian yang dibutuhkan)	Periodik setiap tahapan-3 implementasi program dan kegiatan
	d. Memfasilitas dan mendengarkan pernyataan komitmen	PT memfasilitasi keahlian dan ketrampilan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pro-kemiskinan di internal masing-masing kampus, pada PT di lingkungan zonanya dan di seluruh Aceh, dan pada masyarakat.	Periodik setiap tahapan-4 implementasi program dan kegiatan
	e. Pendampingan	Memberikan pendampingan dengan menyediakan keahlian untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan strategi: “Saling mengisi/melengkapi keahlian antar PT baik dalam zona maupun keseluruhan zona”	Periodik setiap tahapan-5 implementasi program dan kegiatan
	f. Monitoring dan evaluasi	Dilaksanakan dalam durasi implementasi program dan kegiatan secara kolaboratif bersama PT di zona dan stakeholders yang terlibat.	Periodik setiap tahapan-6 implementasi program dan kegiatan

### E. Bentuk Kegiatan dan Pembiayaan

Agar peran Konsorsium perguruan tinggi baik dalam tataran makro dan mikro terlaksana sesuai dengan harapan semua pemangku kepentingan, maka diperlukan identifikasi bentuk kegiatan sebagai langkah awal untuk menjadi pedoman dan referensi bagi konsorsium perguruan tinggi. Ruang lingkup bentuk kegiatan dan pembiayaan bersifat sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan. Bentuk kegiatan ini dibuat untuk memberikan sebagai referensi awal kepada konsorsium perguruan tinggi dalam melakukan kegiatan yang dapat direncanakan dan didukung pula dari sisi penganggaran.

**Tabel 2. Bentuk Kegiatan Konsorsium Perguruan Tinggi**

No	Bentuk Kegiatan	Pembiayaan
1	Seminar, diseminasi, pelatihan, pendampingan dan publikasi artikel-artikel terkait pengentasan kemiskinan	APBN, APBA, APBK, donasi dari CSR BUMN, lembaga mitra pemerintah (NGO) dan swasta
2	Kajian dan analisis penanggulangan kemiskinan di daerahnya dengan menggunakan aplikasi SEPAKAT	Universitas, Pemerintah dan swasta
3	Sistem Elektronik Sistem Database Penanggulangan Kemiskinan Aceh	Pemerintah dan swasta
4	Analisis APBA/APBD yang terkait dengan program <i>pro-poor</i>	Universitas, Pemerintah dan swasta
5	KKN tematik sesuai dengan <i>issues</i>	APBN, APBA, APBK, donasi dari CSR BUMN, lembaga mitra pemerintah (NGO) dan swasta
6	Penelitian mahasiswa (skripsi, tesis dan disertasi)	Universitas, Pemerintah dan swasta
7	Kemitraan dengan kementerian/lembaga	APBD dan APBN

## **BAGIAN III**

### **PERAN KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI**

Peran konsorsium Perguruan Tinggi (PT) bisa dilaksanakan secara makro dan mikro baik untuk peran membantu pemerintah di level provinsi dan kabupaten/kota dalam melahirkan dan merevisi regulasi, melahirkan dan memperkuat program pengentasan kemiskinan, dan melakukan perencanaan anggaran maupun peran dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin.

#### **F. Kolaborasi untuk Pemecahan Masalah**

Setiap masalah sebagai penyebab kemiskinan harus dikaji secara cermat, hati-hati dan komprehensif dengan menggunakan berbagai “kacamata” dari kalangan kaum akademisi, praktisi pemerintah dan pekerja sosial dari kalangan mitra pemerintah (NGO) dan LSM. Kalangan akademisi dengan potensi daya pikir dan analisisnya (*thinking by head*) dapat mengungkap penyebab, asal-usul dan pola munculnya masalah dan menawarkan alternatif-alternatif pemecahannya. Di lain pihak, kalangan praktisi pemerintah, mitra pemerintah dan swasta selalu ada dalam pusaran masalah sehingga mereka bisa langsung mengimplementasi pemecahan masalah (*thinking by hand*) baik dengan menerapkan alternatif pemecahan masalah oleh kalangan akademisi maupun dengan menggunakan pengalaman, ketrampilan dan wewenang yang dimilikinya.

Kedua pendekatan pemecahan masalah di atas harus dipertemukan atau dikolaborasikan menjadi suatu kombinasi “kekuatan” dari dua kekuatan yang masing-masing memiliki otoritas keilmuan dan otoritas kewenangan atau kekuasaan. Perguruan tinggi yang menaungi otoritas keilmuan dan memiliki otoritas kewenangan aplikatif meskipun dalam cakupan terbatas melalui kegiatan pengabdian dan karya sangat mungkin bisa menyatukan dua pendekatan pemecahan masalah tersebut. Namun demikian, agar terkoordinasi dengan baik, perguruan tinggi perlu terus mengembangkan wadah yang menyatukan kepakaran pada suatu area masalah yang saling melengkapi dari beberapa atau semua perguruan tinggi di suatu wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Wadah yang demikian sudah banyak terbentuk dan harus terus diperbanyak sehingga menjadi semakin spesifik areanya.

Kombinasi kekuatan ini diharapkan selalu bisa memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan, penentu dan eksekutor program-program penanggulangan kemiskinan. Kekuatan sebagai hasil *thinking by head* selalu sangat kontributif dalam merumuskan dan merekomendasi alternatif kebijakan beserta program-program turunannya, “mengawasi” dan



mengevaluasi implementasi kebijakan dan eksekusi program. Untuk mengarahkan semua program pada semua level dan spesifikasi lembaga-lembaga pemerintah, area “intervensi” lembaga-lembaga mitra pemerintah dan swadaya masyarakat, Konsorsium perguruan tinggi bisa berkontribusi penting dalam penyusunan *road map* pengentasan kemiskinan setiap lembaga.

Pemecahan masalah bisa didasari pada orientasi yang benar dan tepat. Salah satunya adalah orientasi masalah positif yang merupakan seting kognitif pemecahan masalah yang melibatkan disposisi umum kepada (a) menganggap suatu masalah sebagai “tantangan” (yaitu, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atau keberhasilan), (b) meyakini bahwa masalah dapat dipecahkan (“optimisme”), (c) meyakini kemampuan personal untuk menyelesaikan masalah dengan baik (“keyakinan diri dalam memecahkan masalah”), (d) meyakini bahwa keberhasilan pemecahan masalah membutuhkan waktu dan usaha, dan (e) berkomitmen diri untuk menyelesaikan masalah sampai selesai bukan menghindarinya.

Sebaliknya, orientasi masalah yang negatif merupakan disfungsi atau seting emosional kognitif yang menghambat yang melibatkan kecenderungan umum untuk (a) melihat masalah sebagai ancaman yang signifikan bagi niat baik (psikologis, sosial dan ekonomi), (b) meragukan kemampuan personal seseorang untuk menyelesaikan masalah dengan berhasil (“keyakinan diri yang rendah dalam memecahkan masalah”), dan (c) mudah frustrasi and tersinggung ketika berhadapan dengan masalah (“toleransi terhadap frustrasi yang rendah”).

*Road map* yang dilahirkan lewat pemikiran dan pengalaman praktis mutlak harus dimiliki oleh setiap lembaga untuk mengefektifkan dan mengefesienkan setiap program yang dijalankan melalui jalan yang teruji keakuratannya untuk dilewati. Peta jalan yang demikian bisa disusun dengan mendasarkan pada ketersediaan data melalui kajian-kajian yang menyeluruh dan mendalam untuk setiap komponen atau bagian dari jalan yang harus dilalui.

### **G. Peran Makro dan Mikro Penyusunan Program**

Konsorsium perguruan tinggi dalam memainkan perannya mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan implementasi program percepatan pengentasan kemiskinan mengajukan berbagai model atau program pemberdayaan untuk diterapkan oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Semua model atau program yang diajukan harus didasarkan pada kajian akademik dan kondisi lapangan yang cermat dan matang.

Konsorsium perguruan tinggi dengan mengajak akademisi berbagai keahlian baik dalam lingkup makro maupun mikro bisa berperan aktif dalam mendorong atau membantu

pemerintah mempercepat penuntasan atau pengurangan derajat kemiskinan dari tahun anggaran yang satu ke tahun anggaran berikutnya. Pemberdayaan dalam lingkup makro lebih menekankan pada perumusan strategi dan bentuk kebijakan, program dan kegiatan berskala besar dengan angka waktu menengah dan panjang. Pemberdayaan lingkup ini meliputi penguatan layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, sosial-budaya dengan diperkuat oleh penyajian infrastruktur yang semakin mempermudah transfer keahlian dan ketrampilan, dan transportasi barang dan jasa.

Pada tataran makro, konsorsium mendorong (i) lahirnya regulasi-regulasi yang lebih pro-kemiskinan dan ketenagakerjaan; (ii) sinergisitas ABCGM (*academician, business, community, government and media*); (iii) pengembangan *road map* percepatan pengentasan kemiskinan dan ketenaga kerjaan yang akan dipedomani oleh SKPA, SKPD-SKPD dan lembaga-lembaga terkait lainnya; dan (iv) berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial dan kemasyarakatan;

Pada tataran mikro Konsorsium berperan dalam merumuskan kegiatan-kegiatan untuk dilaksanakan dalam lingkup mikro baik di internal maupun eksternal Kampus. Di internal Kampus bisa berupa: (i) pengembangan jiwa kewirausahaan dan ketrampilan calon pelaku usaha (kalangan muda) di kampus-kampus melalui training-training dan kegiatan “laboratorium” unit-unit usaha; (ii) koordinasi untuk terjalannya kerjasama yang saling melengkapi keahlian dan ketrampilan antar kampus baik dalam pelaksanaan training maupun kegiatan laboratorium pengelolaan unit-unit bisnis; dan (3) pengembangan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan kegiatan usaha dan ketenaga kerjaan yang dikelompokkan dalam kegiatan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sedangkan, untuk eksternal kampus bisa berupa: (i) kegiatan transfer keahlian kepada unit-unit kerja di bawah SKPA, SKPK dan lembaga-lembaga terkait pengembangan jiwa kewirausahaan, dan ketrampilan calon pelaku usaha dan ketenaga kerjaan; (ii) membantu TKP2K Aceh dan kabupaten/kota bersama perangkat gampong melakukan pemetaan sosial untuk mengetahui secara *clear* dan rinci SDA dan SDM untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat; (iii) membantu pengembangan unit-unit kegiatan usaha di gampong-gampong; (iv) melakukan pemberdayaan kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian tematik; (v) mentransfer pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat; dan (vi) menumbuhkan dan meningkatkan jiwa *entrepreneurship* di dalam masyarakat.

Isu-isu yang sangat “keras” dibicarakan adalah menyangkut perilaku yang terus semakin memperluas dan memperdalam tingkat kemiskinan dan menghambat pembukaan dan perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu, melalui peran makro dan mikro konsorsium perguruan tinggi, khusus untuk perubahan perilaku kemiskinan dan penghambatan pengembangan kesempatan kerja bisa dilakukan melalui “pendorongan” tumbuhnya jiwa kewirausahaan di Kampus yang pada gilirannya bisa menciptakan lapangan kerja di kalangan anak muda dan “pengangguran” di gampong-gampong. Peran makro dan mikro (internal dan eksternal kampus) harus dimainkan dengan perencanaan yang valid dan akurat oleh Konsorsium perguruan tinggi.

Selanjutnya, untuk terlaksananya peran makro dan mikro di bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat bisa dilakukan melalui usaha meyakinkan pihak terkait di Kemenag dan Menristek Dikti melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) semua perguruan tinggi agar menyediakan kesempatan riset-riset dan pengabdian yang luas dan terarah menyangkut isu-isu kemiskinan dan ketenaga kerjaan. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian di kalangan dosen dengan melibatkan mahasiswa berprinsip terkerahkan *resources* keahlian dengan mengombinasikan tenaga-tenaga ahli dari berbagai perguruan tinggi.

Deskripsi peran makro dan mikro Konsorsium perguruan tinggi dapat ditunjukkan melalui kerangka model enam-langkah pada Gambar 1 pada halaman berikutnya:

Gambar 1. Peran makro dan mikro Konsorsium Perguruan Tinggi



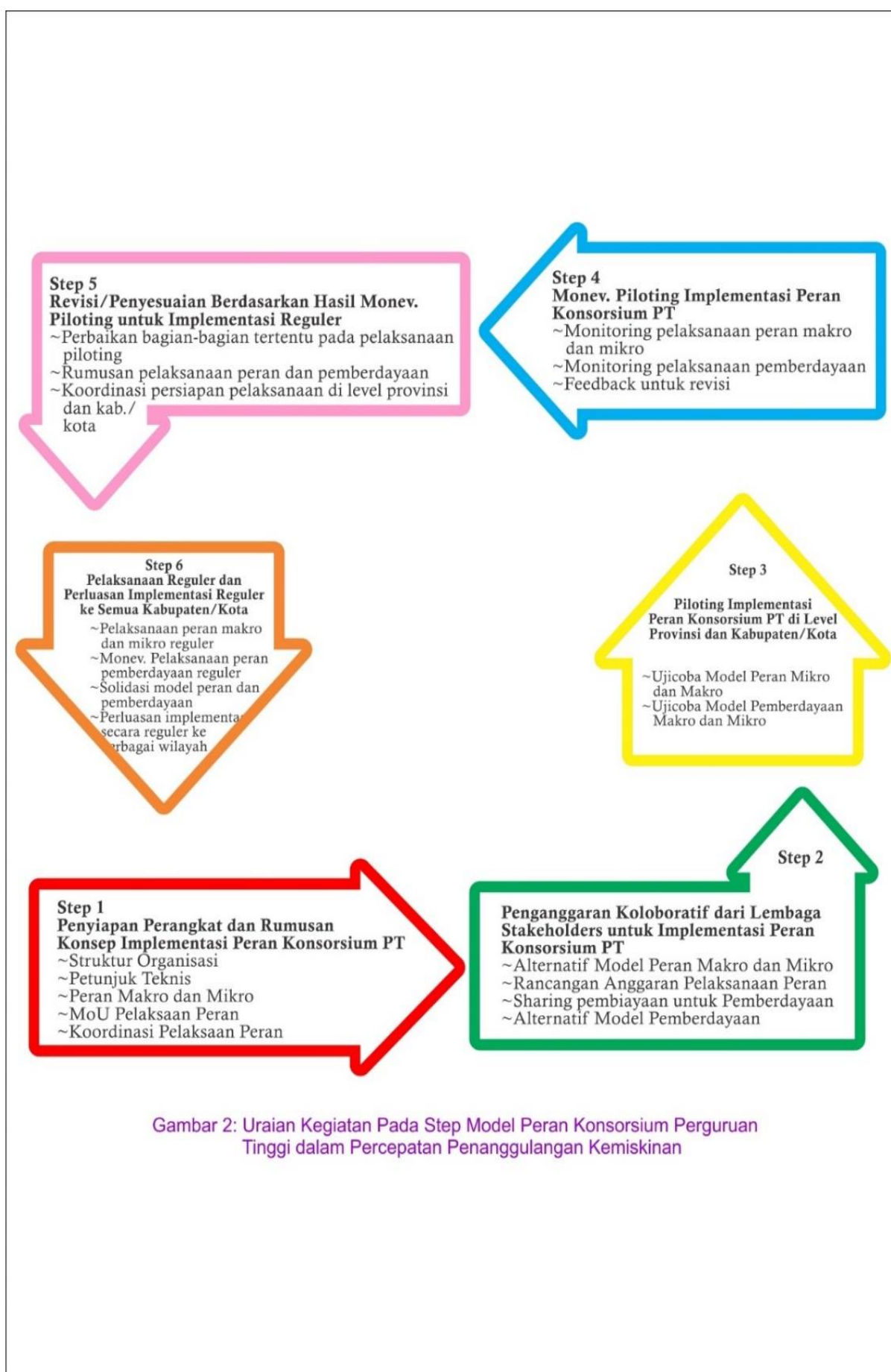
Gambar 1: Model Peran Konsorsium Perguruan Tinggi dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Penyiapan Perangkat dan Rumusan Konsep Implementasi Peran Konsorsium PT dengan kegiatan menyusun: (i) struktur organisasi; (ii) petunjuk teknis; (iii) peran makro dan mikro; (iv) MoU pelaksanaan peran; dan (v) sistem koordinasi pelaksanaan peran. Langkah kedua berupa Penganggaran Kolaboratif dari Lembaga Stakeholders untuk Implementasi Peran Konsorsium perguruan tinggi dengan kegiatan merumuskan: (i) alternatif model peran makro dan mikro; (ii) rancangan anggaran pelaksanaan peran; (iii) sistem sharing pembiayaan untuk pemberdayaan; dan alternatif model pemberdayaan.

*Langkah ketiga* berupa Piloting Implementasi Peran Konsorsium perguruan tinggi di Level Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan kegiatan: (i) ujicoba model peran mikro dan makro; dan (ii) ujicoba model pemberdayaan makro dan mikro. *Langkah keempat* berupa Monitoring dan Evaluasi Piloting Implementasi Peran Konsorsium PT dengan kegiatan menyusun: (i) sistem monitoring pelaksanaan peran makro dan mikro; (ii) sistem monitoring pelaksanaan pemberdayaan; dan (iii) feedback untuk revisi. Langkah kelima berupa Revisi/Penyesuaian Berdasarkan Hasil Monev. Piloting untuk Implementasi Reguler dengan kegiatan: (i) perbaikan bagian-bagian tertentu pada pelaksanaan *piloting*; (ii) rumusan pelaksanaan peran dan pemberdayaan; dan (iii) koordinasi persiapan pelaksanaan di level provinsi dan kab./kota. *Langkah keenam* berupa Pelaksanaan Reguler dan Perluasan Implementasi Reguler ke Semua Kabupaten/Kota dengan kegiatan menyusun: (i) proses pelaksanaan peran makro dan mikro reguler; (ii) proses monev. pelaksanaan peran pemberdayaan reguler; (iii) solidasi model peran dan pemberdayaan; dan (iv) implementasi secara reguler ke berbagai wilayah. Uraian kegiatan-kegiatan model peran di atas ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini.

Penerapan model kelembagaan konsorsium dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan akan mengatasi kelemahan yang terjadi pada model kelembagaan yang ada sekarang, melalui kemampuannya dalam mendorong terjadinya *interdependency* dan memfasilitasi terjadinya proses saling belajar di antara seluruh pihak yang terlibat. Model kelembagaan konsorsium juga akan mendorong terjadinya *pool resources* dan pemanfaatan yang lebih terarah dan efisien

**Gambar 2. Alur Implementasi Pelibatan Perguruan Tinggi**



Gambar 2: Uraian Kegiatan Pada Step Model Peran Konsorsium Perguruan Tinggi dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peran dan fungsi masing-masing pihak dalam skema kolaborasi multi pihak pada penanggulangan kemiskinan dioperasionalkan dalam peran masing-masing pihak pada seluruh tahapan yang meliputi; Kelembagaan, Manajemen, Pendanaan, Teknologi, Produksi dan Pasar sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3: Operasionalisasi Peran Para Pihak dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

NO	Aspek pelibatan	Para Pihak	Peran
1.	Kelembagaan	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasca MOU pemerintah segera melakukan sosialisasi secara berjenjang hingga ke pemerintahan level bawah.</li> <li>2. Memfasilitasi terbangunnya proses pembentukan kelembagaan</li> <li>3. Membuat regulasi yang dibutuhkan</li> </ol>
		Perguruan Tinggi dan NGO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendesain bentuk kelembagaan yang tepat sesuai kebutuhan.</li> <li>2. Memberikan asistensi pada proses pembentukan kelembagaan.</li> </ol>
		Pemerintah Desa	Memfasilitasi sarana serta dukungan teknis pelaksanaan.
2.	Manajemen	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan data calon penerima manfaat</li> <li>2. Kebijakan anggaran untuk memastikan keberlanjutan eksistensi kelompok binaan.</li> <li>3. Memberikan bimbingan dan pengawasan secara berkala agar anggota kelompok tetap produktif / beraktifitas</li> </ol>
		Perguruan Tinggi & NGO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisa kebutuhan sumberdaya serta spesifikasinya</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas anggota kelompok /masyarakat agar memiliki skill mumpuni dalam rangka pelaksanaan &amp; pengembangan program</li> <li>3. Memberikan pendampingan secara berkelanjutan melalui program UMD (Universitas Masuk Desa) dan Model lain.</li> </ol>
		Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan sumberdaya ahli perusahaan untuk melatih ilmu-ilmu praktis kepada kelompok pengelola program.</li> <li>2. Replikasi multi sistem, TI, Manajemen Operasional untuk diterapkan ke dalam program</li> </ol>
3.	Pendanaan	Desa	Dukungan kepada penyediaan sumberdaya / skil yang tersedia di Masyarakat.
		Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kebijakan untuk pemamfaatan dana CSR.</li> </ol>

NO	Aspek pelibatan	Para Pihak	Peran
			2. Mengupayakan bantuan sarana / peralatan.
		Kadin	Mengusahakan kerjasama melalui investasi
		Desa	1. Mengalokasikan dukungan pendanaan dari dana desa dalam bentuk hibah. 2. Penyertaan Modal melalui Bumdes
		Pemerintah	1. Mengalokasikan anggaran melalui mekanisme penganggaran dengan sumber dana APBN (Otsus), APBA, APBK . 2. Fasilitasi Kerja sama dan Investasi 3. Dukungan Sarana
4.	Teknologi	Perguruan Tinggi	1. Melakukan penelitian yang lebih focus terkait dengan pengembangan program 2. Memanfaatkan serta mengembangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan program. 3. Melakukan inovasi-inovasi baru serta merancang smart teknologi yang dapat meningkatkan kualitas program 4. Perguruan Tinggi mengupayakan agar menjadi Pusat Unggulan Iptek (PUI) dan Pusat Inovasi untuk setiap komoditi unggulan di masing-masing wilayahnya.
		NGO	1. Mengadopsi system teknologi smart yang telah terbukti sukses penerapannya di wilayah-wilayah binaannya kemudian diterapkan untuk meningkatkan kualitas program. 2. Melakukan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas program
		Perusahaan	1. Memfasilitasi manajemen / kelompok pengelola program untuk pelaksanaan magang guna peningkatan skill manajemen/kelompok. 2. Melakukan alih teknologi yang dapat diterapkan pada program
		Pemerintah	Memanfaatkan teknologi terapan/tepat guna yang dihasilkan oleh even TTG maupun yang dihasilkan oleh masyarakat lokal dan nasional.
5.	Produksi	Perguruan Tinggi / NGO	1. Melakukan Riset dan Inovasi untuk meningkatkan kualitas dan untuk kepentingan diversifikasi produk 2. Memberikan asistensi/Pembinaan untuk memastikan kegiatan produksi tetap berjalan 3. Quality Assurance untuk memastikan kualitas produk dapat memenuhi standar kebutuhan pasar.



NO	Aspek pelibatan	Para Pihak	Peran
		Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Skill untuk peningkatan kualitas dan pengembangan produk</li> <li>2. Memberikan akses pada perolehan bahan baku bila tersedia</li> </ol>
		Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses kepada pemanfaatan bahan baku</li> <li>2. Membuat kebijakan untuk ketersediaan bahan baku</li> </ol>
		Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengawasan secara berkala</li> <li>2. Membentuk kelompok kerja khusus yang anggotanya terdiri dari unsur dinas Koperasi, Dinas terkait, Dinas Kesehatan, BPOM untuk memferivikasi berbagai produk yang akan /sudah dihasilkan</li> <li>3. Memfasilitasi kemudahan izin produk</li> <li>4. Membantu agar setiap produk tersertifikasi.</li> </ol>
6.	Pasar	Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat kebijakan internal perusahaan untuk mengutamakan penggunaan produk lokal (bertindak sebagai Offtaker)</li> <li>2. Menghubungkan produk dengan jaringan pasar/offtaker (Market Linkage).</li> <li>3. Bertindak sebagai trader (Pasar online seperti; Buka Lapak, Lazada dll).</li> <li>4. Bersama Pemerintah menggelar berbagai even/pameran dan promosi lokal/nasional dan Internasional</li> </ol>
		NGO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghubungkan produk dengan jaringan pasar / oftaker (Market Linkage).</li> <li>2. Memfasilitasi kerja sama antara produsen (Produk Masyarakat) dengan trader lokal, Nasional dan Internasional.</li> <li>3. Membantu Kajian dan analisa untuk pengembangan pasar.</li> </ol>
		Kadin/Media	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu publikasi secara meluas melalui berbagai even dan misi dagang .</li> <li>2. Memfasilitasi promosi melalui media online dan media cetak.</li> <li>3. Mempertemukan para buyer dengan sentra-sentra produksi yang dihasilkan melalui program kolaborasi multi pihak dalam penanggulangan kemiskinan.</li> </ol>
		BUMG	Bertindak sebagai pembeli (oftaker) sekaligus sebagai penjual kembali (Trader).
		Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat regulasi tentang kewajiban seluruh pihak seperti Pemerintah, kalangan Dunia Usaha, sektor pariwisata dll harus mengutamakan penggunaan produk lokal.</li> </ol>

NO	Aspek pelibatan	Para Pihak	Peran
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mewajibkan berbagai Supermarket /Swalayan yang beroperasi di wilayah Aceh untuk menyediakan tempat khusus bagi penjualan produk-produk lokal (program penanggulangan kemiskinan.</li> <li>3. Memfasilitasi berbagai kegiatan expo baik lokal , nasional dan internasional.</li> <li>4. Khususnya komoditas padi dan Jagung pemerintah harus membeli dari petani dan kemudian membentuk tim khusus untuk mencari pasar.</li> </ol>
		TKP2K dan TKPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun dan meningkatkan kualitas koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam skema kolaborasi penanggulangan kemiskinan mulai tingkat nasional, lokal hingga desa</li> <li>2. Melakukan pengawasan guna memastikan seluruh proses program terlaksana sebagai mana yang direncanakan .</li> <li>3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi dan RTL.</li> </ol>
		Kelompok Sasaran	Bertindak sebagai pelaksana utama dan terlibat di semua proses

Operasionalisasi peran para pihak dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus berjalan secara simultan terkoordinasi dengan baik melalui wewenang Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh. Pada setiap aspek pelibatan semua pemangku kepentingan berperan untuk saling memperkuat usaha pencapaian tujuan dan sasaran yang disepakati. Pada bagian ini operasionalisasi diuraikan secara singkat tentang peran perguruan tinggi pada setiap aspek pelibatan.

### 1. Kelembagaan

Seiring dengan konseptualisasi kemiskinan yang semakin meluas dan multidimensional, dalam satu dekade terakhir telah muncul diskursus intensif mengenai pentingnya faktor kelembagaan (*institutions*) sebagai variabel penting dalam meningkatkan keberhasilan penanganan masalah kemiskinan. Diskursus tersebut menyiratkan bahwa menangani kemiskinan yang persisten tidak dapat dilakukan kecuali faktor-faktor ekonomi, politik dan sosial serta institusional dibahas secara bersamaan. Faktor ekonomi terkait dengan aksesibilitas sumber daya dan kesempatan, sedangkan faktor sosial berkaitan dengan upaya untuk membuat orang miskin dapat hidup secara wajar sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya Dalam proses pembentukan kelembagaan program-program pemberdayaan masyarakat, perguruan tinggi

sangat penting terlibat dalam mendesain bentuk kelembagaan yang tepat sesuai kebutuhan. Perguruan tinggi juga secara aktif memberikan asistensi pada proses pembentukan kelembagaan tersebut. Dalam mendesain bentuk kelembagaan, peran perguruan tinggi yang tercakup dalam kategori makro ini selalu didasari pada hasil penelitian dan kajian.

## **2. Manajemen**

Pada tataran manajemen, perguruan tinggi harus terlibat aktif di dalam melakukan analisis kebutuhan sumberdaya beserta spesifikasinya. Dilanjutkan dengan peran untuk meningkatkan kapasitas anggota kelompok/masyarakat melalui kegiatan pelatihan untuk mengembangkan *skill* yang mumpuni dalam rangka pelaksanaan & pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan. Perguruan tinggi juga secara aktif dan intensif memberikan pendampingan melalui berbagai model pengabdian tematik yang dibarengi dengan penelitian, misalnya model UMD dan model-model tematik-inovatif lainnya.

## **3. Teknologi**

Bidang ini menjadi “tupoksi” utama bagi perguruan tinggi sebagai *center of excellence* untuk terus-menerus melakukan penelitian terfokus terkait dengan pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat. Tugas ini dijalankan dengan memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan program pemberdayaan masyarakat. Perguruan tinggi juga terus melakukan inovasi-inovasi baru serta merancang *smart* teknologi yang dapat meningkatkan kualitas program-program pemberdayaan masyarakat. Untuk mewujudkan rangkaian tugas tersebut, perguruan tinggi terus juga meningkatkan kualitasnya sebagai pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan pusat inovasi untuk setiap komoditi unggulan di masing-masing wilayah/zona keberadaannya serta zona-zona lainnya yang membutuhkan keahliannya.

## **4. Produksi**

Proses untuk melahirkan produk-produk program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terus ditingkatkan kepraktisan, efektivitas dan efisiensinya agar menghadirkan kualitas yang dapat diterima pasar dengan baik. Perguruan tinggi secara berkesinambungan melakukan riset dan inovasi untuk meningkatkan kualitas untuk kepentingan diversifikasi produk dengan memberikan asistensi atau pembinaan dalam memastikan kegiatan produksi tetap berjalan sesuai standar yang disepakati.

## 5. Keperantaraan Pasar

Dalam rangka memperkuat kolaborasi antar pihak untuk mendorong pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, dilakukan pendekatan keperantaraan yang menghubungkan berbagai potensi agar terjalin usaha yang saling menguntungkan, adil, dan berkesinambungan. Selain itu, perguruan tinggi juga melakukan riset dan inovasi untuk meningkatkan kualitas untuk kepentingan diversifikasi produk. Perguruan tinggi juga memberikan asistensi beserta pembinaan untuk memastikan kegiatan produksi tetap berjalan dan menghasilkan produk yang variatif dan memenuhi kualitas sesuai standar kebutuhan pasar.

Kemiskinan dan ketimpangan didorong oleh rendahnya akses terhadap pelayanan pasar, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sumber daya alam dan sulitnya mencari sumber pembiayaan dan lemahnya pemahaman tentang perkembangan sistem bisnis. Perkembangan teknologi dan cepatnya perubahan model bisnis menuntut setiap pelaku untuk dapat adaptif dan menciptakan bisnis proses yang mapan. Untuk keterlibatan pada beberapa hal tersebut, perguruan tinggi yang berada di zona konsorsium akan menjadi lead dalam memfasilitasi dan mendampingi kelompok usaha di daerahnya untuk terhubung dengan keperantaraan pasar.

## **BAGIAN IV.**

### **INSTRUMEN DALAM PELAKSANAAN PELIBATAN KONSORSIUM PERGURUAN TINGGI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Efektivitas program penanggulangan kemiskinan memerlukan penanganan yang komprehensif dan sinergis antara program-program yang ada. Terdapat tiga faktor kunci agar anggaran penurunan kemiskinan dapat menyejahterakan masyarakat, yaitu penggunaan dana yang tepat, adanya sumber daya manusia (SDM) yang kapabel, sistem pendukung dan monitoring serta evaluasi (monev) untuk memantau dan mengevaluasi manfaat dana penurunan kemiskinan. Dalam pelaksanaan peran pendampingan dalam pembuatan kebijakan, penyusunan program dan perencanaan anggaran maupun dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, konsorsium perguruan tinggi mempersiapkan dan atau menggunakan berbagai instrumen yang sudah tersedia dengan menyesuaikan pada kebutuhan. Instrumen yang digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan di kabupaten/kota. Beberapa instrument atau alat bantu yang dapat digunakan akan diuraikan sebagai berikut:

#### **I. Analisis Kondisi Kemiskinan Daerah melalui Aplikasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran, Analisis & Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT).**

Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan sebuah Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) sebagai sistem yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berdasarkan bukti. SEPAKAT merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, terkait strategi penanggulangan kemiskinan, dimana salah poinnya mengarahkan terwujudnya pemanfaatan sistem informasi terpadu yang berpihak kepada masyarakat miskin.

SEPAKAT merupakan hasil pengembangan dari dua alat analisa/system yaitu P3BM (Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan Pro-Miskin) dan SIMPADU (Sistem Informasi Terpadu). SEPAKAT juga telah berintegrasi dengan SNAPA (Sub National Poverty Assessment), sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Bank Dunia dengan memanfaatkan data makro dan mikro yang berasal dari BPS, Kemensos, dan Pemerintah Daerah. Dengan integrasi ketiga sistem tersebut, Pengembangan SEPAKAT didukung oleh Pemerintah Australia melalui program bilateral KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) dan Bank Dunia.

Kehadiran SEPAKAT diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan yang lebih *pro-poor* berbasis web dan bukti (*evidence-based*). Selain itu, SEPAKAT membantu mendorong terciptanya interaksi antar pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan dalam mengatasi isu-isu kemiskinan secara lebih efektif, inovatif dan tepat sasaran, dalam satu wadah *knowledge hub* SEPAKAT. Melalui SEPAKAT, pemerintah daerah akan mampu menghasilkan analisa yang dapat menjadi masukan terkait proses e-Monev, e-Planning, e-Budgeting, serta aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), sehingga upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan tepat guna.

SEPAKAT dapat diakses oleh pihak manapun yang berkepentingan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Aceh. Program KOMPAK Aceh telah memberikan pelatihan dasar kepada TKPK 23 kabupaten/kota dalam menggunakan aplikasi SEPAKAT, berikut akses login aplikasi SEPAKAT untuk masing-masing kabupaten/kota:

No.	Kabupaten/Kota	User ID	Login
	Provinsi Aceh	Prov.aceh	aceh@2018
1	Kota Banda Aceh	kota.bandaaceh	bandaaceh@2018!
2	Kota Langsa	Kota.langsa	langsa@2018!
3	Kota Lhokseumawe	Kota.lhokseumawe	lhokseumawe@2018!
4	Kota Sabang	Kota.sabang	sabang@2018!
5	Kota Subulussalam	kota.subulussalam	subulussalam@2018!
6	Kabupaten Aceh Barat	kab.acehbarat	acehbarat@2018!
7	Kabupaten Aceh Barat Daya	Kab.acehbaratdaya	acehbaratdaya@2018!
8	Kabupaten Aceh Besar	kab.acehbesar	acehbesar@2018!
9	Kabupaten Aceh Jaya	kab.acehjaya	acehjaya@2018!
10	Kabupaten Aceh Selatan	kab.acehselatan	acehselatan@2018!
11	Kabupaten Aceh Singkil	kab.acehsingkil	acehsingkil@2018!
12	Kabupaten Aceh Tamiang	kab.acehtamiang	acehtamiang@2018!
13	Kabupaten Aceh Tengah	kab.acehtengah	acehtengah@2018!
14	Kabupaten Aceh Tenggara	kab.acehtenggara	acehtenggara@2018!
15	Kabupaten Aceh Timur	kab.acehtimur	acehtimur@2018!
16	Kabupaten Aceh Utara	kab.acehutama	acehutama@2018!

No.	Kabupaten/Kota	User ID	Login
17	Kabupaten Bener Meriah	kab.benermeriah	benermeriah@2018!
18	Kabupaten Bireuen	kab.bireuen	bireuen@2018!
19	Kabupaten Gayo Lues	Kab.gayolues	gayolues@2018!
20	Kabupaten Nagan Raya	kab.naganraya	naganraya@2018!
21	Kabupaten Pidie	kab.pidie	pidie@2018!
22	Kabupaten Pidie Jaya	Kab.pidiejaya	pidiejaya@2018!
23	Kabupaten Simeulue	kab.simeulue	simeulue@2018!

Untuk lebih jelas bagaimana tutorial menggunakan aplikasi SEPAKAT dapat mengunjungi laman <http://sepakat.bappenas.go.id/>

Peran Penting Perguruan Tinggi. Sebagaimana uraian bagian sebelumnya, penerapan instrumen SEPAKAT dapat memperkuat peran pemda dalam menyusun rencana dan melaksanakan program-program pembangunan untuk penurunan kemiskinan. Namun, konsistensi pemanfaatan instrumen dan pengembangan kapasitas yang hanya ditempatkan di pemda akan memiliki beberapa risiko, yaitu:

1. Bias dalam perkembangannya, mengingat sering kali ketiadaan data tertentu pada waktu-waktu yang kritis akan memerlukan cara dan metode yang baik untuk menjaga kualitas dan kesinambungan sistem. Langkah ini memang dapat diatasi dengan tim data yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BPS Daerah, namun masih ada kemungkinan bias “politik” dalam proses pengadaan data tersebut.
2. Kesinambungan sistem apabila ada pergantian pejabat di kalangan pemda.
3. Menjaga objektivitas system.

Sehubungan dengan itu, SEPAKAT juga perlu ditempatkan di perguruan tinggi lokal untuk:

1. **Mengurangi dan menghilangkan risiko.** Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan, penelitian riset, dan pengembangan berdasarkan proses ilmiah. Sehubungan dengan itu, penempatan SEPAKAT di perguruan tinggi akan mendorong mereka menjaga standar kualitas data secara berkesinambungan berdasarkan kaidah ilmiah. Ketiadaan data secara kontinu, pemutakhiran data, serta pengembangan data dapat dijaga secara ilmiah dan dijauhkan dari bias data karena ketidakmampuan pemda atau adanya campur tangan/keinginan politik sesaat. Selain itu instrumen dapat dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa untuk riset dan pengembangan lebih lanjut.

Keberadaan SEPAKAT di perguruan tinggi juga dapat digunakan sebagai alat pendidikan dan/atau bahan ajar berdasar pengalaman empiris/ Peran Perguruan Tinggi dalam Mengawal Penerapan Sepakat untuk Peningkatan Efektivitas Penurunan Kemiskinan di Daerah lapangan tentang pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan kepada sumber daya manusia yang lebih muda. Adanya SEPAKAT di perguruan tinggi juga dapat menjadi bahan riset dan pengembangan lebih lanjut, saat diperlukan adanya analisis kebijakan dan program dan adanya *review* untuk penyempurnaan kebijakan dan program di lapangan.

2. ***Ada “oversight” capacity (kapasitas pengawasan) program penanggulangan kemiskinan di daerah.*** Sejalan dengan dua peran sebelumnya, penempatan SEPAKAT di perguruan tinggi akan menambah jaringan lembaga untuk mengawasi SEPAKAT dan memperluas pemanfaatannya untuk penanggulangan kemiskinan di daerah. Penempatan SEPAKAT akan membuat perguruan tinggi memiliki kapasitas “pemanding” pemda dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk “peran pengawasan” SEPAKAT di daerah. Dalam hal ini Perguruan Tinggi dapat memberikan analisa data untuk penanggulangan kemiskinan yang netral (tidak bias politik) sebagai pembanding analisa yang dilakukan oleh pemda, yang seringkali bias politik untuk kepentingan kepala daerah.
3. ***Pemerintah pusat memiliki mitra untuk memberikan umpan balik atas upaya penurunan kemiskinan di daerah.*** Dengan ketiga peran tersebut pemerintah pusat memiliki mitra objektif (karena berdasar proses ilmiah) yang menjaga SEPAKAT, memanfaatkannya secara obyektif (sehingga menjadi standar lokal), dan memberikan umpan balik pada waktu diperlukan.

Dengan adanya keterlibatan perguruan tinggi, akan terjadi proses kemitraan perguruan tinggi di daerah dalam memperkuat pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukan analisis kebutuhan secara tepat. Keberadaan SEPAKAT di perguruan tinggi memberikan akses kontinu kepada perguruan tinggi saat pemerintah pusat dan daerah membutuhkannya. Selian itu, kehadiran perguruan tinggi juga diharapkan bagian dari pengawalan penyaluran dan penggunaan dana secara tepat. Perguruan tinggi dapat menjadi mitra pengawas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan SEPAKAT<sup>1</sup>

---

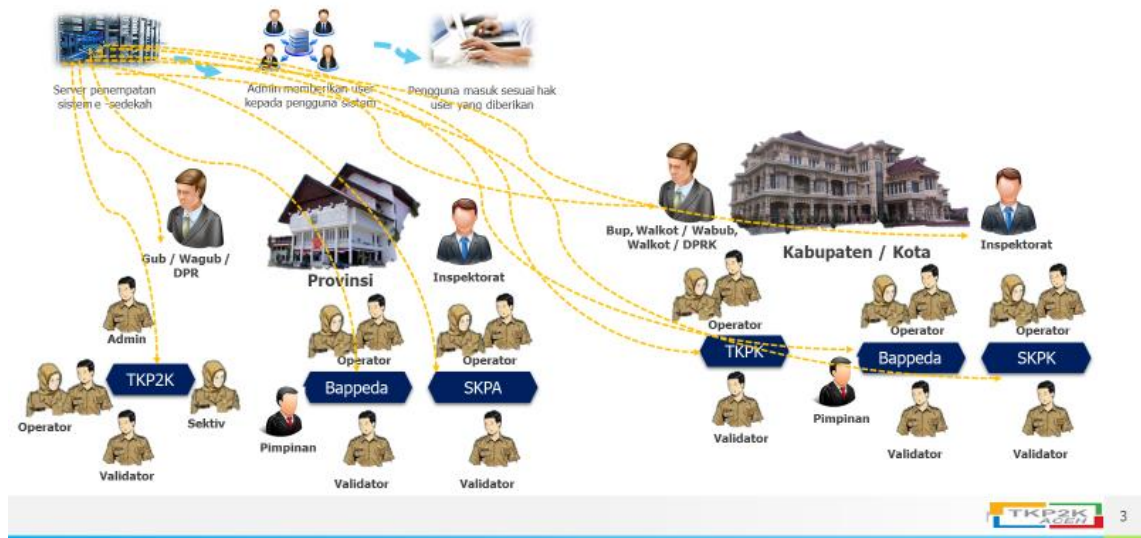
<sup>1</sup> Murniningtyas, Endah. (2017). Seri Kertas Kerja KOMPAK Nomor 4: Peran Perguruan Tinggi dalam Mengawal Penerapan SEPAKAT untuk Peningkatan Efektivitas Penurunan Kemiskinan di Daerah. Bappenas dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).



## I. Aplikasi E-Sedekah

Aplikasi E-Sedekah adalah sebuah aplikasi yang dirancang dan dibuat untuk mencatat masyarakat miskin diseluruh provinsi Aceh serta mencatat pemberdayaan yang telah dan akan diberikan oleh pemerintah dari sisi aspek infrastruktur dasar, pangan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan. Aplikasi ini berbasis website, database my SQL, berjalan pada linux, windows, android, mac. Aplikasi ini akan membantu kepala daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan data yang sangat akurat *“by name by address”*

### Hak Akses Sistem



Aplikasi e-sedekah merupakan alat bantu yang akan diberikan aksesnya kepada pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam SKPD di kabupaten/kota, login aplikasi ini gratis bagi, lebih jelas mengenai aplikasi ini dapat menghubungi <https://tkp2k.acehprov.go.id/>.

### Cara Kerja Sistem



## J. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik

Lebih dari 3.000 universitas dan lembaga tinggi di Indonesia melakukan kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata atau program yang sejenis); sebuah potensi sumber daya yang sangat besar yang sejatinya dapat memberikan kontribusi dan dampak positif bagi desa miskin. Tujuan dan capaian KKN yang lebih strategis perlu dibangun guna memberikan arahan yang jelas agar kegiatan KKN lebih berdayaguna dalam membangun desa. Oleh karena itu diperlukan adanya kolaborasi serta dukungan dari berbagai pihak agar dapat memaksimalkan hasil kegiatan KKN<sup>2</sup>.

Program Universitas Membangun Desa (UMD) yang diprakarsai oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), sebuah Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia, dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada serta menghasilkan dampak yang lebih positif untuk masyarakat desa, komunitas dan pemerintah daerah dimana kegiatan dilaksanakan. Program UMD diharapkan dapat menjadi sebuah model inovatif dalam mengoptimalkan sumber daya telah ada yaitu KKN atau program sejenis dalam membangun desa dengan melibatkan berbagai pihak terutama perguruan tinggi, pemerintah daerah dan masyarakat.

Desain program menggunakan Teknik PAR (*Participatory Action Research*). Teknik ini digunakan dalam seluruh rangkaian kegiatan. Dalam kaitan dengan desain program, program disusun secara partisipatif, yaitu dengan pelibatan masyarakat secara penuh. Teknik ini memberi keuntungan bagi panitia pelaksana dan bagi masyarakat itu sendiri. Keuntungan bagi panitia pelaksana adalah program yang dihasilkan bukan hanya dimiliki oleh panitia saja, namun masyarakat juga merasa memiliki program tersebut. Keuntungan bagi masyarakat adalah mereka mengusulkan program yang mereka anggap sesuai dengan kondisi yang mereka miliki. Kemudian, masyarakat lebih mudah dalam mengontrol proses dan mengikuti proses perkembangannya secara baik<sup>3</sup>.

### Keuntungan Bagi Mahasiswa

Keuntungan yang diperoleh mahasiswa melalui KPM Inovatif ini adalah menambah keahlian mahasiswa dalam hal pendamping masyarakat. Keahlian bagi mahasiswa ini diperoleh melalui tiga bentuk atau tahapan, yaitu:

1. Pelatihan bagi mahasiswa. Pengetahuan dan keahlian bagi mahasiswa diperoleh melalui pelatihan. Materi utama pelatihan adalah teknik *Participatory Action Research (PAR)* dan latihan-latihan cara menjalankannya.

---

<sup>2</sup> Lihat selengkapnya <https://inspirasi-umd.id/>

<sup>3</sup> Lihat final report KPM Inovatif UIN Ar-raniry 2017

- 1) Monitoring dan evaluasi. Bahan monitoring dan evaluasi adalah memastikan seluruh proses yang dilakukan mahasiswa telah sesuai dengan materi pelatihan, mengisi instrumen yang telah disediakan, dan integritas mahasiswa selama di lapangan.
- 2) Pelaporan kegiatan. Dalam laporan kegiatan KPM Inovatif, mahasiswa diminta menjelaskan rangkaian proses kegiatan yang mereka lakukan di lapangan dan capaian yang telah dihasilkan. Melalui laporan ini, mahasiswa dapat merasakan aspek penting dari yang telah mereka lakukan, dan juga sebaliknya, aspek kelemahan yang mereka lakukan. Dengan demikian, penulisan laporan kegiatan dapat meningkatkan keahlian mahasiswa dalam pendampingan masyarakat dan teknik penulisan laporan kegiatan hasil pendampingan masyarakat.
- 3) Mahasiswa dapat merasakan secara langsung proses pendampingan terhadap masyarakat.

#### **Keuntungan Bagi Masyarakat**

Masyarakat juga memperoleh pembelajaran dari kegiatan ini. Pembelajaran tersebut adalah berupa:

1. Masyarakat mendapatkan *sharing knowledge* sesuai dengan tema dan perkembangan terbaru.
2. Masyarakat memiliki sumber daya manusia yang dapat diakses sesuai dengan kebutuhan.
3. Masyarakat yang didampingi secara partisipatif dan berkelanjutan dapat meningkatkan ekonomi mereka secara signifikan. Jadi, pendampingan yang selama ini mereka dapatkan selama ini terkendala pada menjaga keberlanjutan program dan *linkage* program. Pada program KPM Inovatif ini, *linkage* program diwujudkan dengan melibatkan berbagai institusi/lembaga yang memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti BPM, Dekranasda, Baitul Mal, Disnakermobduk, dan Bappeda.

#### **J. Analisis Anggaran Belanja Untuk Penanggulangan Kemiskinan**

Analisis anggaran belanja penanggulangan kemiskinan adalah analisis terhadap alokasi dan manajemen anggaran belanja publik dalam bidang atau sektor (urusan pemerintah) yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Analisis ini terutama mengacu kepada anggaran belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Meskipun demikian, keterkaitan antara anggaran pemerintah dengan anggaran non-pemerintah (swasta, lembaga

donor (*off-budget*) dan NGO) tetap perlu diperhatikan karena salah satu fungsi anggaran belanja pemerintah adalah untuk menstimulasi keterlibatan pihak non-pemerintah, khususnya pihak swasta, dalam pendanaan pelayanan publik. Anggaran belanja pemerintah di sini harus merupakan anggaran yang sudah direalisasikan (dieksekusi) dari APBD dan APBN. Berkaitan dengan maksud di atas, analisis anggaran penanggulangan kemiskinan dimaksudkan untuk:

1. Menentukan lingkup bidang (sektor) analisis anggaran belanja
2. Mengetahui komposisi anggaran belanja sektor menurut sumber pembiayaannya.
3. Mengetahui komposisi anggaran belanja sektor menurut penyelenggara layanan.
4. Mengetahui komposisi anggaran belanja sektor menurut mata anggaran.
5. Mengetahui komposisi anggaran belanja sektor menurut jenis program.
6. Mengetahui relevansi alokasi anggaran belanja untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah.
7. Mengetahui efektivitas alokasi anggaran belanja untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah.

## **BAGIAN V PENUTUP**

Kemiskinan tidak lagi wilayah eksklusif sektor publik, banyak lembaga non pemerintah terlibat di dalam penanganan masalah tersebut. Namun minimnya upaya pemerintah untuk mengkoordinasikan pihak-pihak tersebut dalam kebijakan yang terpadu menjadikan masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri telah menjadi salah satu pemicu ketidakberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan selama ini. Tingkat koordinasi antar lembaga yang sangat minim telah memperlemah dalam perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi yang mengakibatkan tingginya tingkat ketidaktepatan distribusi bantuan dan inefisiensi sumber daya dan mengakibatkan hasil yang kurang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Implementasi dari semua tahapan yang diuraikan dalam naskah ini dalam bentuk kolaborasi pelaksanaan peran makro dan mikro bisa dilakukan secara parsial berdasarkan kluster yang relevan dengan para pihak yang disebutkan di atas. Kolaborasi juga bisa dilaksanakan secara integral melibatkan beberapa pihak dengan beberapa kluster yang disepakati. Skema pelaksanaan peran kolaboratif yang tercantum pada semua lampiran naskah ini akan memandu dengan baik pelaksanaannya. Kalau skema kolaborasi ini berjalan dengan baik, maka diyakini bahwa upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di suatu wilayah secara meyakinkan dari waktu ke waktu akan memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan.

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan, penelitian riset, dan pengembangan berdasarkan proses ilmiah. Salah satu fungsi kehadiran perguruan tinggi dalam penanggulangan kemiskinan adalah mendorong menjaga standar kualitas data secara berkesinambungan berdasarkan kaidah ilmiah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Ketiadaan data secara kontinu, pemutakhiran data, serta pengembangan data dapat dijaga secara ilmiah dan dijauhkan dari bias data karena ketidakmampuan pemda atau adanya campur tangan/keinginan politik sesaat.

Selain itu, Peningkatan Efektivitas Penurunan Kemiskinan di Daerah lapangan tentang pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan kepada sumber daya manusia yang lebih muda. Beberapa peran perguruan tinggi yang diharapkan dapat terwujud di kabupaten/kota di Aceh diantaranya:

- a) Ada kapasitas pengawasan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Kehadiran perguruan tinggi akan menambah jaringan lembaga untuk mengawasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Konsorsium perguruan tinggi memiliki

kapasitas “pemanding” pemda dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk “peran pengawasan” di daerah. Dalam hal ini perguruan tinggi dapat memberikan analisa data untuk penanggulangan kemiskinan yang netral (tidak bias politik) sebagai pembanding analisa yang dilakukan oleh pemda, yang seringkali bias politik untuk kepentingan kepala daerah.

- b) Pemerintah kabupaten/kota memiliki mitra untuk memberikan umpan balik atas upaya penurunan kemiskinan di daerah. pemerintah kabupaten/kota memiliki mitra objektif yang berdasarkan proses ilmiah, memanfaatkannya secara obyektif (sehingga menjadi standar lokal), dan memberikan umpan balik pada waktu diperlukan. Dengan adanya konsorsium, keterlibatan perguruan tinggi, akan terjadi proses kemitraan perguruan tinggi di daerah.
- c) Analisis kebutuhan secara tepat, keberadaan konsorsium perguruan tinggi diharapkan memberikan akses kontinu kepada pemerintah kabupaten/kota yang membutuhkannya.
- d) Pengawasan penyaluran dan penggunaan dana secara tepat. Konsorsium Perguruan tinggi dapat menjadi mitra pengawas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan SEPAKAT.

## Referensi

Blanden J, Gibbons S. 2006. *The persistence of poverty across generations a view from two british cohorts*. Published for the *Joseph Rowntree Foundation* by The Policy Press. [Internet]. Diunduh 12 Desember 2019

Murniningtyas, Endah. (2017). Seri Kertas Kerja KOMPAK Nomor 4: *Peran Perguruan Tinggi dalam Mengawal Penerapan SEPAKAT untuk Peningkatan Efektivitas Penurunan Kemiskinan di Daerah*. Bappenas dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

### Referensi lainnya:

<http://www.tnp2k.go.id/>

<https://tkp2k.acehprov.go.id/>

<https://kompak.or.id/id>

<https://inspirasi-umd.id/activities>

## LAMPIRAN 1:

### Peran Konsorsium Perguruan Tinggi

#### **Makro:**

- (1) Mendorong lahirnya kebijakan yang pro-kemiskinan dan peningkatan jumlah lapangan kerja melalui pelibatan pada Musrenbang dan Kebijakan Anggaran;
- (2) Mendorong sinergisitas ABCGM (*academics, business, community, government and media*);
- (3) Membantu implementasi program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yang sesuai dengan *road map*; dan
- (4) Berkoordinasi dengan swasta dan lembaga sosial-kemasyarakatan.

#### **Mikro (internal kampus):**

- (1) Pengembangan jiwa kewirausahaan dan ketrampilan calon pelaku usaha kalangan muda kampus melalui training-training dan kegiatan inkubasi bisnis;
- (2) Koordinasi jalinan kerjasama saling melengkapi keahlian dan ketrampilan antar kampus baik dalam pelaksanaan training maupun kegiatan inkubasi bisnis;
- (3) Pengembangan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan kegiatan usaha dan ketenagakerjaan yang dikelompokkan dalam kegiatan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

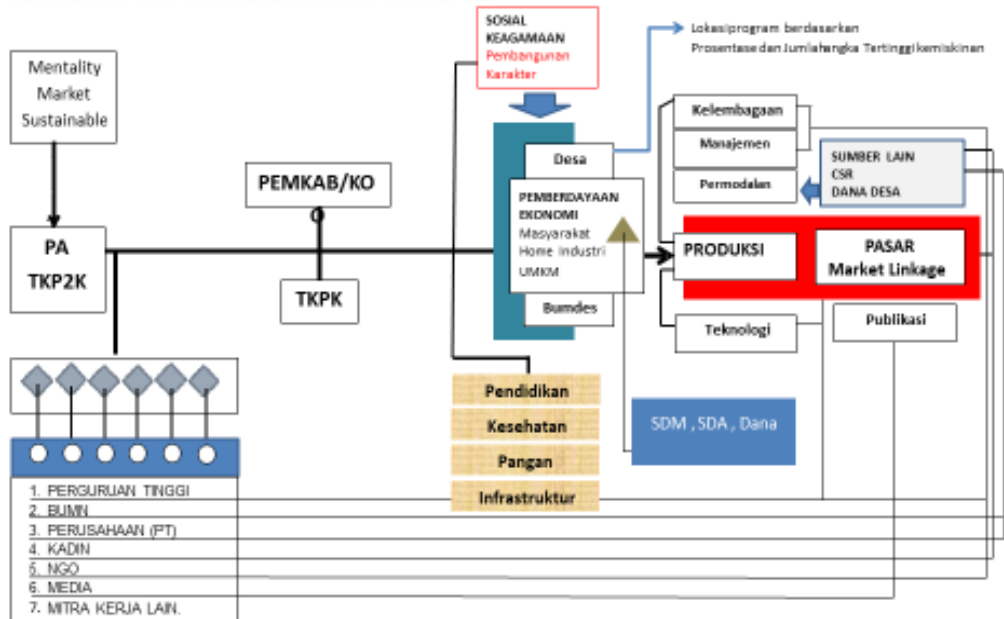
#### **Mikro (eksternal kampus):**

- (1) Melaksanakan kegiatan transfer keahlian kepada unit-unit kerja di bawah SKPA, SKPK dan lembaga terkait pengembangan jiwa kewirausahaan dan ketrampilan calon pelaku usaha dan ketenaga kerjaan;
- (2) Membantu TKP2K Provinsi dan kabupaten/kota dan gampong-gampong melakukan pemetaan sosial untuk mengidentifikasi SDA dan SDM untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- (3) Membantu pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan unit-unit usaha di desa;
- (4) Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dengan model Universitas Membangun Desa (UMD) dan model KKN tematik lain;
- (5) Mendorong Perguruan Tinggi agar menjadi Pusat Unggulan Iptek dan Pusat Inovasi terkait pengembangan potensi unggulan di wilayah masing-masing.



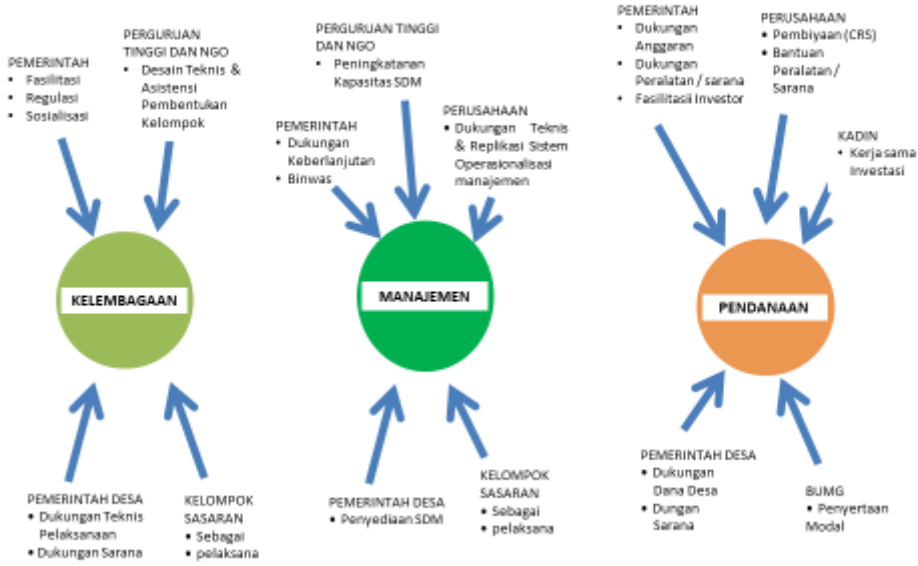
## LAMPIRAN 2:

SKEMA KOLABORASI ALIANSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI ACEH 2019



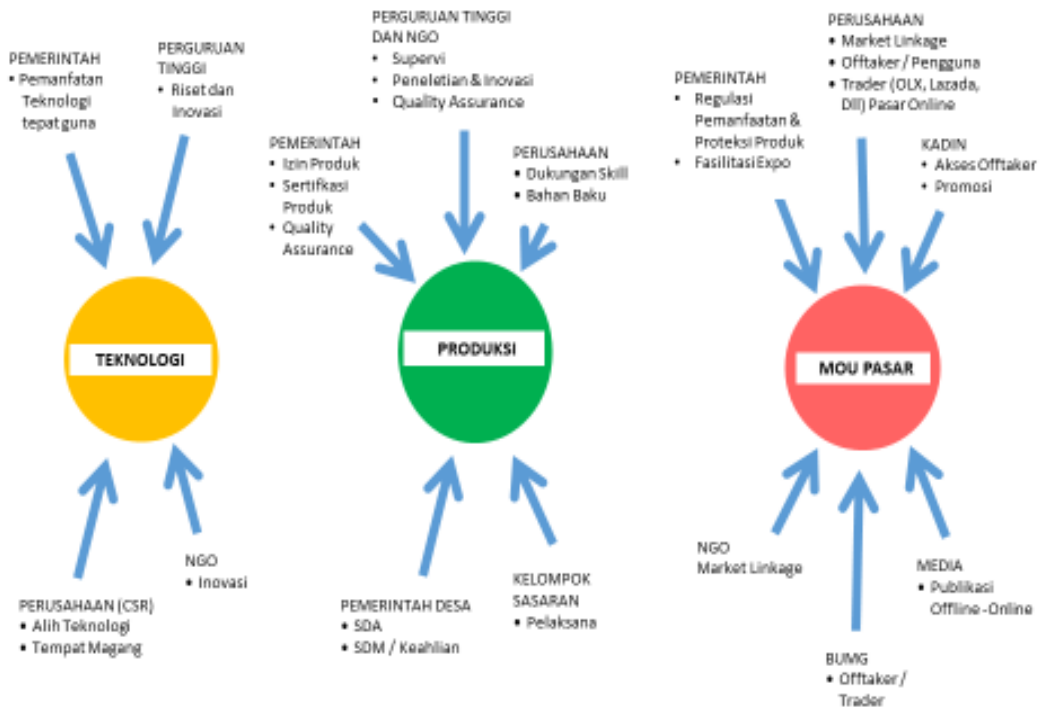
### LAMPIRAN 3:

#### POTENSI & PERAN PARA PIHAK DALAM SKEMA KOLABORASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (PERBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS POTENSI UNGGULAN)



#### LAMPIRAN 4:

##### POTENSI & PERAN PARA PIHAK DALAM SKEMA KOLABORASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (PERBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS POTENSI UNGGULAN)





**Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) ACEH**

Gedung Bappeda Aceh

Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No.26 Banda Aceh Kode Pos 23121

Telpon 0651 2682252

<https://tkp2k.acehprov.go.id>